TESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFESIENSI BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018-2020

Factors Affecting the Efficiency of Spending on Goods and Services in Mamuju Regency from 2018 to 2020

MAMAT
A042192007

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

TESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFESIENSI BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018-2020

Factors Affecting the Efficiency of Spending on Goods and Services in Mamuju Regency from 2018 to 2020

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disususn dan diajukan oleh

MAMAT
A042192007

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

TESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFESIENSI BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018-2020

Factors Affecting the Efficiency of Spending on Goods and Services in Mamuju Regency from 2018 to 2020

disusun dan diajukan oleh

MAMAT
A042192007

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 18 Februari 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Dr. Syarifuddin, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA	**Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA**
NIP. 196302101990021001	**NIP. 196703191992032003**

Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah,	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Dr. Mursalim Nohong, S.E.,M.Si	Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E.,M.Si
NIP. 197106192000031001	NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Mamat
NIM	:	A042192007
Program Studi	:	Magister Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul :

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efesiensi Belanja Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2018-2020

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 21 Februari 2022

Yang menyatakan,

Mamat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Tesis dengan judul "**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efesiensi Belanja Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2018-2020"** ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A,** Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.,CIPM,** Dekan Fakuktas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Mursalim Nohong, SE.,M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Prof. Dr. Syarifuddin, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA,** dan **Dr. R.A. Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA** selaku pembimbing dan tim penasihat yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan meluangkan waktu untuk berdiskusi selama penyusunan tesis;

5. Bapak **Dr. Muhammad Sobarsyah, SE.,M.Si.** Ibu **Dr. Darmawati, SE.,M.Si.,Ak.,CA** dan Ibu **Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE.,M.Si.** selaku penguji yang juga sangat berperan besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan dan penyempuranaan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
7. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
8. Teman, saudara seperjuangan Kelas MKD atas segala bentuk kerjasama, kekompakan, serta motivasi dalam proses perkuliahan sampai selesai masa studi;
9. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan Tesis ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi penulisan Tesis ini. Karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Mamuju, Februari 2022
Penulis

M A M A T

ABSTRAK

MAMAT. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Efisiensi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 - 2020* (dibimbing oleh Syarifuddin dan R. A. Damayanti).

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efesiensi belanja barang Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 - 2020.

Penelitian bersifat kuantitatif. Data sekunder berupa angka-angka yang berasal dari laporan keuangan masing-masing organisasi perangkat daerah yang dapat diakses melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data dianalisis menggunakan statistik dengan desain penelitian studi pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*) untuk menguji pengaruh antarvariabel dan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) besaran anggaran belanja barang dan jasa organisasi perangkat daerah berpengaruh terhadap efisiensi anggaran belanja barang dan jasa organisasi perangkat daerah dan (2) jumlah pegawai organisasi perangkat daerah berpengaruh terhadap efisiensi anggaran belanja barang dan jasa organisasi perangkat daerah.

Kata kunci: besaran anggaran belanja, besaran jumlah pegawai, efisiensi belanja barang dan jasa

ABSTRACT

MAMAT. *Factors Affecting the Efficiency of Spending on Goods and Services in Mamuju Regency from 2018 to -2020* (supervised by Syarifuddin and Damayanti).

This study aims to analyze and explain the factors affecting the efficiency of spending on goods and services of regional apparatus organizations (OPD) in the government of Mamaju Regency from 2018 to 2020.

This research was a quantitative study as the research data were in the form of numbers. The secondary data were taken from the financial statements of each regional apparatus organization that can be accessed through Regional Financial and Asset Management Agency. The data analysis used statistics with research design of a hypothesis testing study to test the effect between variables and the regression analysis used simple linear regression analysis by means of SPSS 26.

The results show that (1) the number of the budget for goods and services of regional apparatus organizations affect the efficiency of budget for goods and services of regional apparatus organizations, and (2) the number of employees of regional apparatus organizations affects the efficiency of the expenditure of goods and services of regional apparatus organizations.

Keywords: the amount of budget, the number of employees, and the efficiency of spending on goods and services.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iv
PRAKATA v
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1. Anggaran Sektor Publik 10
9.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik 10
9.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik 10
2.2. Belanja Daerah 13
2.2.1 Belanja Langsung 15
2.3. Efisiensi 16
2.4. Teori *Public Expenditure* 18
2.5. Penelitian Terdahulu 20

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 22
3.1 Kerangka Konseptual 22
3.2 Hipotesis 23

BAB IV METODE PENELITIAN 32
4.1. Jenis Penelitian..... 32
4.2. Populasi dan Sampel 32
4.2.1 Populasi..... 32
4.2.2 Sampel..... 33
4.3. Jenis dan Sumber Data 34
4.4. Metode Pengumpulan Data..... 34
4.5. Definisi Operasional 35
4.6. Pengujian Hipotesis 37
4.7. Teknik Analisis Data..... 38
4.8. Analisis Koefisien Determinasi 39
4.9. Uji Regresi Parsial 39

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 40
5.1 Hasil Analisis Data 40
5.1.1 Anggaran Belanja Barang dan Jasa OPD 2018-2020 40
5.1.2 Jumlah Pegawai OPD 2018-2020 41
5.1.3 Tingkat Efisiensi Belanja Barang dan Jasa OPD 2018-2020. 42
5.2 Uji Asumsi Klasik..... 43
5.2.1 Uji Normalitas..... 43
5.2.1 Uji Multikolinearitas..... 44
5.3 Hasil Regresi Data 45
5.4 Uji Hipotesis 46
5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)..... 46
5.4.2 Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)..... 47
5.5 Pembahasan..... 48
5.5.1 Pengaruh Besaran Anggaran Belanja Barang dan Jasa OPD Terhadap Efisiensi Anggaran Belanja Barang dan Jasa OPD di Kabupaten Mamuju Tahun 2018-2020..... 49

5.5.2 Pengaruh Jumlah Pegawai OPD Terhadap Efisiensi Anggaran Belanja Barang dan Jasa OPD di Kabupaten Mamuju Tahun 2018-2020 50

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 52

6.1 Kesimpulan 52

6.2 Saran 52

DAFTAR PUSTAKA 54

LAMPIRAN 57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun 2018-2020 6

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 20

Tabel 4.1 Sampel Penelitian 33

Tabel 4.2 Kriteria Mengukur Efisiensi Belanja Pemerintah 36

Tabel 5.1 Uji Normalitas..... 43

Tabel 5.2 Uji Multikolinearitas..... 44

Tabel 5.3 Hasil Regresi Data 45

Tabel 5.4 Koefisien Determinasi..... 46

Tabel 5.5 Uji Regresi Secara Parsial..... 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 23
Gambar 5.1 Grafik Anggaran Belanja Barang dan Jasa OPD tahun 2018-2020 40
Gambar 5.2 Grafik Jumlah Pegawai OPD tahun 2018-2020 41
Gambar 5.3 Grafik Efisiensi Anggaran Belanja Barang dan Jasa OPD tahun 2018-2020 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perencanaan keuangan merupakan salah fungsi yang sangat penting di dalam sebuah organisasi. Selain berhubungan langsung dengan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, perencanaan yang matang juga dapat medorong sebuah sistem untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Hal demikian juga berlaku bagi organisasi pemerintah, perencanaan yang baik sangat penting, sebab yang seluruh kegiatan pemerintah akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Perencanaan merupakan suatu tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan garis-garis besar untuk dapat melakukan usaha, dimana kebijaksanaan ditetapkan, rencana kerja disusun, baik mengenai saat dilaksanakan dan bagaimana usaha itu akan dikerjakan.

Setiap keputusan yang diambil dalam proses perencanaan sekurang-kurangnya memperhatikan dua macam pedoman, yaitu pedoman kualitatif dan kuantitatif. Pedoman kualitatif pada perencanaan dapat berupa pengembangan manajemen, citra organisasi, sumbangsi pada masyarakat, pengembangan bakat, dan kemajuan teknik, sedangkan pedoman kuantitatif adalah pedoman yang mengajukan pertanyaan “seberapa banyak”, inilah nama yang sering sekali disebut Anggaran (Safitri, 2018).

Menurut Mardiasmo (2009:70) umumnya pengelolaan dan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik atau pemerintah cenderung sangat lemah. Umumnya lembaga-lembaga pemerintah belum menjalankan fungsi dan peran penganggaran secara efisien. Persoalan yang seringkali muncul ialah Underfinancing atau *Overfinancing*. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Situasi ini tentunya menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran yang pada dasarnya merupakan dana publik habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur dalam proses pembangunan.

Persoalan tersebut ditenggarai oleh lingkungan organisasi sektor publik, yang pada umumnya melihat proses penggaran sebagai sebiah proses yang politis. Padahal meskipun bukan organiasi yang berorientasi pada laba. Anggaran dalam organisasi pemerintah, juga dituntu untuk dapat mengakomodir berbagai tuntutan masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan di daerah. Sehingga keakuratan dalam preses pengganggaran senantias harus berpedoman pada efektifitas dan efisiensi (Mulyani, 2015).

Sebagai sebuah pendekatan, akuntansi sektor publik adalah sebuah disiplin yang memiliki peran, salah satunya menganalisis pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya,

pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. Yang dimaksud *value for money* adalah ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan penggunaan sumber daya alam, artinya bahwa penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Setiap tahun anggaran yang menjadi masalah rutin dalam anggaran adalah rendahnya daya serap anggaran.

Efisiensi merupakan sebuah konsep yang berangkat dari prinsip *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio-rasio antara ouput dengan input. Semakin besar output dibanding input maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk relatif. Semisal, Unit A adalah lebih efisien dibandingkan dengan unit B, unit A lebih efisiensi tahun ini dibandingkan tahun lalu, dan seterusnya, Efisiensi diukur melalui rasio yang membandingkan nilai keluaran dan masukan (Mardiasmo, 2009:133-134). Berdasarkan ketentuan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat 4 menyatakan bahwa efisien sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluar tertentu.

Berbeda dengan prinsip efisiensi, prinsip efektivitas menilai keberhasilan suatu sistem melalui ketetapatan sebuah sistem dalam memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu guna menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya (Abdurahmat 2003: 92). Hal terpenting yang perlu di catat adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Instansi pemerintah memiliki berbagai anggaran diantaranya adalah anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran pendapatan adalah suatu perkiraan mengenai batas penerimaan tertinggi keuangan pemerintah sebagai sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja negara. Sedangkan anggaran belanja adalah suatu perkiraan mengenai batas pengeluaran tertinggi keuangan pemerintah bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah untuk satu tahun.

Suatu perusahaan maupun instansi pemerintah dalam menyusun anggaran perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi syarat perusahaan dalam menyusun anggaran yaitu adanya organisasi perusahaan yang sehat yang membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukkan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, adanya sistem akuntansi yang memadai, adanya penelitian analisis yang diperlukan untuk menetapkan alat ukur prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi, adanya dukungan dari para pelaksana anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada dukungan aktif dari para pelaksana dari tingkat atas maupun tingkat bawah. Selain memiliki

berbagai anggaran instansi pemerintah juga memiliki berbagai jenis belanja diantaranya adanya belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan kelompok belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Dimana, Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan, seperti belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Belanja langsung barang dan jasa merupakan salah satu komponen dalam kelompok belanja langsung yang digunakan untuk opersional pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja ini penting karena belanja barang dan jasa

berkaitan dengan pembiayaan pemerintahan secara keseluruhan. Biaya-biaya ini dikeluarkan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah melalui pembelian barang dan jasa yang diharapkan dapat menunjang setiap fungsi pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari besaran alokasi anggaran pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju yang mencapai persentase signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap tahun, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah membelanjakan dana yang cukup besar. Anggaran untuk sektor ini dalam APBN tahun anggaran 2016, tidak kurang dari Rp.4,22 miliar atau (34% dari APBD), tahun 2017 sekitar Rp.3,16 miliar (25% dari APBD), dan tahun 2018 sekitar Rp.4,22 miliar (33% dari APBD) yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa.

Tabel 1.1 Persentase Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Mamuju tahun 2018-2020

Belanja Barang dan Jasa			
Tahun	**Belanja Barang dan Jasa**	**Total Belanja Langsung**	**Persentase**
2018	Rp 278.642.882.306	Rp 577.347.347.395	48,26%
2019	Rp 296.700.834.128	Rp 617.513.949.058	48,05%
2020	Rp 291.052.554.069	Rp 548.971.366.877	53,02%

Sumber : sekunder, diolah

Dalam rangka prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, setiap pemerintah daerah di dorong untuk melakukan pengelolaan belanja barang dan jasa yang efisien. Sebab ruang lingkup dari *output* dan *outcome* pengelolaan

barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan daerah (Lisyanto, 2012).

Pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa pemerintah daerah yang belum optimal dapat mempengaruhi tingkat pencapaian pemerintah daerah. Sebagaimana sebuah studi yang dilakukan oleh Safitri (2019) yang melakukan penelitian di yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, menemukan bahwa kualitas sarana dan prasarana yang masih kurang yang dipengaruhi oleh kurang optimalnya pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa, telah berdampak pada menurunnya kelancaran pencapaian program kerja pemerintah setempat.

Sementara studi yang dilakukan oleh Sianturi (2020), yang melakukan penelitian di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Minahasa Tenggara, menemukan bahwa kinerja keuangan yang diukur melalui efektifitas dan efisiensi belanja barang dan jasa, dari tahun ke tahun telah berjalan dengan baik. Dan waktu bersamaan layanan untuk membantu masyarakat dan memberikan layanan melalui program-program prioritas pembangunan yang dijalankan telah berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pengeluaran belanja langsung barang dan jasa di Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian yang berjudul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efesiensi belanja barang Pemerintah Kabupaten Mamaju Tahun 2018-2020.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah besaran anggaran belanja pada suatu organisasi perangkat daerah (OPD) berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi belanja barang dan jasa?
2. Apakah besaran jumlah pegawai pada suatu organisasi perangkat daerah (OPD) berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi belanja barang dan jasa?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah

1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh besaran anggaran belanja pada suatu organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap tingkat efisiensi belanja barang dan jasa.
2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh besaran jumlah pegawai pada suatu organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap tingkat efisiensi belanja barang dan jasa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan efisiensi dalam mengelola keuangan yang telah dianggarkan

oleh pemerintah agar menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tepat dan akurat.

2) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Sektor Publik

2.1.1. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk menjalankan rencana–rencana atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pendek yang dinyatakan dalam satuan unit kuantitatif. Anggaran digunakan sebagai alat atau sistem pengendalian manajemen yang sangat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi baik di sektor swasta maupun di sektor publik (Wati dkk, 2013).

Organisasi sektor publik pada dasarnya membutuhkan sebuah mananjemen yang baik dalam melaksanakan tugas berupa visi dan misi yang diembankan oleh negara kepadanya. Dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program, sedangkan dalam sektor swasta, penyusunannya dilakukan oleh manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan (Bastian, 2010: 71). Tujuan dari organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat sehingga cita-cita dari pemerintah dapat sejalan dengan keinginan masyarakat (Noerdiawan, 2007). Dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran memiliki perananan penting sebagai alat manajemen untuk mengendalikan operasi perusahaan agar strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik jika dalam penyusunannya tetap memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran.

Sehingga dapat disimpulkan anggaran sektor publik merupakan alat yang dibutuhkan manajemen untuk melaksanakan visi dan misi suatu organisasi. Anggaran sektor publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik untuk diberi kritikan atau pun masukan. Karena tujuaan dari organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

2.1.2. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Dalam organisasi sektor publik menerapkan sistem anggaran dalam kegiatan operasionalnya, maka dari itu anggaran memiliki beberapa fungsi menurut Sujarweni (2015:29) adalah sebagai berikut :

a) Alat Perencanaan

   Anggaran berfungsi sebagai merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh organisasi sektor publik.

b) Alat Pengendalian

   Anggaran sebagai sebagai alat pengendalian ini dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.

c) Alat Kebijakan Fiskal

   Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan organisasi sektor publik, hal ini akan mempermudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

d) Alat Politik

Bentuk dokumen politik dapat dijadikan komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

e) Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja kebagian seluruh bagian organisasi. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan organisasi.

f) Alat Penilaian Kerja

Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja. Dimana penilaian kinerja organisasi sektor publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.

g) Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan organisasi, maka manajemen dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik.

h) Alat Menciptakan Ruang Publik

Keberadaan anggaran tidak boleh diabaikan oleh berbagai organisasi sektor publik seperti birokrat, DPR/MPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Beberapa pihak tersebut terlibat

secara langsung maupun tidak langsung dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir juga akan selalu berusaha untuk mempengaruhi besarnya anggaran pemerintah. Sedangkan kelompok masyarakat yang tidak terorganisir akan mempercayakan pendapat dan aspirasinya melalui proses politik yang ada.

2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pelayanan umum (Bastian, 2010). Menurut PP No. 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban peemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengalokasikan belanja secara adil dan merata, agar kebutuhan setiap masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh agar tercipta pelayanan publik yang maksimal. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, dan kegiatan serta jenis belanja:

1. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan

   Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Contohnya:

   a) Penataan ruang daerah;

b) Pelayanan Pendidikan (penyelenggaraan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS).

2. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

a) Pelayanan umum;
b) Ketertiban dan keamanan;
c) Ekonomi;
d) Lingkungan hidup;
e) Perumahan dan fasilitas umum;
f) Kesehatan;
g) Pariwisata dan budaya;
h) Pendidikan;
i) Perlindungan sosial.

3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Contohnya

a) Program Pekan Imunisasi Nasional;
b) Program Pengembangan Pariwisata (Penyelenggaraan Solo International Performing Art (SIPA).

4. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:

a) Belanja Tidak Langsung
    1) Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Bulanan Pegawai);
    2) Belanja Bunga;

3) Belanja Subsidi;
4) Belanja Hibah;
5) Belanja Bantuan Sosial;
6) Belanja Bagi Hasil;
7) Bantuan Keuangan;
8) Belanja Tak Terduga.

b) Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai (Honorarium);
2) Belanja Barang dan Jasa;
3) Belanja Modal.

2.2.1. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara langsung, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

   Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja jenis ini antara lain untuk menampung honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh setisp aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

2. Belanja Barang dan Jasa

   Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan untuk dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

3. Belanja Modal

   Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aktiva tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

2.3 Efisiensi

Menurut Afonso Schuknecht dan Tanzi (2003) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan sektor publik dan efisiensi didefinisikan sebagai hasilnya relatif terhadap sumber daya yang digunakan, namun masih sangat terbatas. Witurachmi (2016) menyatakan bahwa kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang sebesar–besarnya.

Menurut Duta dan Riharjo (2013) Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil.

Daya yang dimaksud meliputi pikiran, waktu, biaya, tenaga. Perbandingan itu meliputi:

a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat memperoleh hasil yang ditetapkan.
b) Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Ada tiga indikator efisiensi berdasarkan penelitian, yaitu:
    1) Pengelolaan Keuangan sekolah telah terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan.
    2) Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan pendidikan pada setiap unit kerja.
    3) Hemat, tidak mewah dan sesuai dengan kebutuhan.

Mardiasmo (2009), efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Mahmudi (2007) mengatakan bahwa efisiensi adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja.

$$\textbf{Efisiensi} = \frac{\textbf{Realisasi Anggaran}}{\textbf{Capaian Output}} \textbf{ x 100\%}$$

Dalam rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud *realisasi anggaran* dalam penelitian ini yaitu anggaran belanja langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan *capaian output* adalah jumlah output yang dihasilkan menggunakan realisasi anggaran.

Sementara kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja diukur dengan kriteria sebagai berikut:

1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2) Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka dikatakan kurang efisien.
3) Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka dikatakan cukup efisien.
4) Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

2.4 Teori *Public Expenditure*

Public Expenditure merupakan pendekatan yang umumnya digunakan untuk memahami perkembangan pengeluaran pemerintah, maka dapat dianalisis melalui teori makro dan teori mikro. *Public Expenditure* juga sering disebut dengan istilah *Government expenditure*. Konsep ini digunakan untuk menganalisis pembelian barang dan jasa, yang merupakan injeksi terhadap perekonomian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Teori *Public Expenditure* bertujuan membantu Pemerintah Indonesia mengidentifikasi kendala utama agar belanja publik dapat lebih efisien dan efektif. Kajian ini juga merekomendasikan cara meningkatkan kualitas belanja untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mikesel (dalam Anwar Shah, 2007), *Public Expenditure atau* belanja pemerintah senantiasa mengacu pada alokasi dana untuk membiayai apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Penganggaran adalah proses menentukan apa yang akan dilakukan dan bagaimana pembiayaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan tersebut pada tahun-tahun yang akan datang.

Menurut Carol Lewis (dalam Anwar Shah, 2007) terdapat enam nilai pokok yang dapat dijadikan acuan untuk menilai kualitas belanja pemerintah, yaitu ekonomis, efisien, efektif, adil, akuntabel, dan responsif, yang secara detail sebagai berikut:

1) Ekonomis berarti anggaran tersebut selalu meningkat jumlahnya;
2) Efisien berarti alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang didapatkan;
3) Efektif berarti alokasi anggaran sesuai dengan tujuan yang direncanakan;
4) Adil berarti alokasi dan hasilnya sesuai dengan nilai keadilan;
5) Akuntabel berarti proses penganggaran dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
6) Responsif berarti proses aenganggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sehingga proses perencanaan belanja daerah bukan merupakan suatu proses yang sederhana, karena terkait dengan mekanisme perencanaan yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang sangat beragam. Proses

penyusunan rencana kegiatan dan anggaran belanja yang baik tentunya akan merespons kepentingan masyarakat dan mewujudkannya dalam anggaran yang efisien, sehingga menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan perencanaan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian tentang analisis efesiensi dan efektivitas pengeluaran anggaran belanja langsung barang dan jasa pemerintah daerah. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut ini:

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	**(Febby Indah Safitri, 2018)** Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Belanja Langsung Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang	Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan anggaran belanja langsung sudah cukup baik. Namun ada beberapa dalam unsur pengelolaan keuangan yang masih harus diperbaiki.	Penelitian ini mengambil sampel di tingkat pemerintah kota secara keseluruhan, bukan pada level dinas/SKPD.	Menganalisis variabel yang sama, ialah efektiftas dan efesiensi pengeluaran belanja langsung.
2	**(Oktania Nurussyfa dan Endang Kartini Panggiarti, 2020)** Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung dan	tingakt efisiensi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2017 sampai dengan 2019 sudah efisien yaitu	Analisis berfokus pada pengeluaran tidak langsung	Menganalisis variabel yang sama, ialah efektiftas dan efesiensi pengeluaran belanja di level SKPD.

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Tidak Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	dibawah 60% dan tingkat efektivitasnya pada tingkat 90% yang artinya pengelolaan keuangan terhadap Anggaran Belanja sudah terealiasi dengan baik.		
3	**(Dian Novita, 2016)** Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	Penelitian menunjukkan bahwa menunjukan bahwa tingkat rata-rata efisiensi Desa-desa di Kecamatan Leuwiliang sebesar 81%, yang memenuhi kriteria cukup efisien, dan tingkat rata-rata efektivitas Desa-desa di Kecamatan Leuwiliang sebesar 92%, termasuk dalam kategori efektif.	Peneltian ini, mengambil sampel pada pengeluaran dana desa	Menganalisis variabel yang sama, ialah efektiftas dan efesiensi pengeluaran belanja.